

LAPORAN

Monitoring & Evaluasi

CEK SEKOLAH-KU



Transparency International Indonesia

2016

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Pendahuluan.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Metodologi	2
1.4 Variabel Analisis.....	3
2 Konteks Program.....	5
2.1 Pengalaman Implementasi <i>Cek Sekolah-Ku</i>	7
3 Hasil Monitoring dan Evaluasi	10
3.1 Rencana vs Capaian.....	10
3.2 Relevansi	11
3.3 Efektivitas	16
3.4 Efisiensi	18
3.5 Keberlanjutan	22
4 Kesimpulan.....	25
5 Rekomendasi	26
Lampiran.....	27

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu 3 tahun Transparency International Indonesia (TI-I) telah mendorong pelibatan masyarakat dalam sektor pendidikan. Melalui inisiatif *Cek Sekolah-Ku*, TI-I telah memfasilitasi masyarakat di empat wilayah, yakni: Kota Semarang, Makassar, Palangka Raya dan Kabupaten Batang. Masyarakat terfasilitasi untuk bertemu dengan pemerintah daerah, khususnya dengan pemangku kepentingan Dinas Pendidikan. Di mana siswa, orang tua, dan masyarakat umum dapat aktif memantau dan menyampaikan masukan terhadap kondisi sekolah. Pemerintah daerah juga sudah mulai meningkatkan keterbukaan. Tanggapan dari Pemerintah daerah juga positif dalam memberikan umpan balik masyarakat tersebut.

Perluasan program (*scale-up*) *Cek Sekolah-Ku* dua tahun terakhir meliputi penambahan jumlah sekolah yang terlibat dan peningkatan keterlibatan dengan pemerintah baik lokal maupun nasional dalam bentuk yang lebih mengikat, seperti penandatanganan kesepakatan bersama (MoU). Upaya ini dilakukan untuk memastikan pemerintah responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Praktik-praktik partisipatif semacam ini diharapkan mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang baik pada prinsip transparansi dan akuntabel. Sehingga pelayanan publik yang prima diharapkan dapat terwujud.

1.2 Tujuan

Monitoring dan evaluasi program *Cek Sekolah-Ku* bertujuan untuk:

- 1) Merangkum capaian program, tantangan dan hambatan pelaksanaan program di tingkat lokal,
- 2) Mengukur relevansi, efektifitas, efisiensi dan model/skema keberlanjutan program,
- 3) Menemukan praktek baik dan pembelajaran bagi perubahan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

1.3 Metodologi

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi *Cek Sekolah-Ku* menggunakan metode Riset Aksi Partisipatoris. Di mana riset dilakukan secara partisipatif baik pada aras pelaku kebijakan dan juga pihak penerima manfaat. Tujuan dari penggunaan metode riset aksi ini adalah menjembatani kesenjangan analisis masalah antara pelaku kebijakan dan penerima manfaat dari kebijakan yang seringkali bias, serta mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif.

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam riset aksi monitoring ini adalah:

- Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten
- Kepala Sekolah
- Guru
- Siswa
- Masyarakat/orang tua murid
- Infomediaries
- Agen sekolah

1.4 Variabel Analisis

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam riset aksi monitoring dan evaluasi *Cek Sekolah-Ku* juga diharapkan mampu menjawab problem-problem implementasi program, seperti:

a) Relevansi

Sejauh mana implementasi program *Cek Sekolah-Ku* memberikan jawaban terhadap problem-problem pendidikan di empat wilayah. Dimensi relevansi dibatasi pada aras transparansi, akuntabel, partisipatif dan pendekatan teknologi informasi. Sehingga pertanyaan dasar dari dimensi ini adalah:

- Relevansi *Cek Sekolah-Ku* untuk mendukung transparansi tata kelola pendidikan di tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan,
- Relevan *Cek Sekolah-Ku* dalam mendorong akuntabilitas penggunaan sumber daya publik di sektor pendidikan,
- Relevansi *Cek Sekolah-Ku* dalam meningkatkan partisipasi warga sekolah untuk membangun pola relasi yang partisipatoris dalam ekosistem tata kelola pendidikan.

b) Efektivitas dan Efisiensi

Tingkat partisipasi warga dan pembuat kebijakan di tingkat sekolah dan level kota/kabupaten menjadi hal yang perlu diukur untuk menilai sejauh mana pola, mekanisme dan sistem yang dibangun dalam implementasi *Cek Sekolah-Ku* di lapangan. Pertanyaan dari dimensi ini adalah:

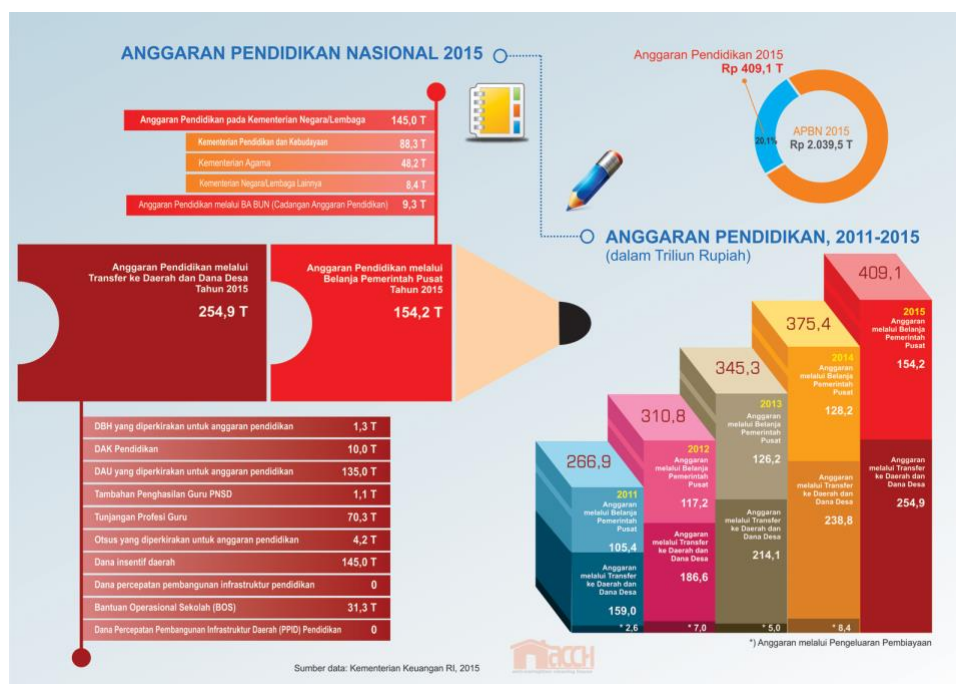
- Efektivitas *Cek Sekolah-Ku* yang saat ini dikelola oleh masyarakat,
- Efisiensi *Cek Sekolah-Ku* dalam memberikan masukan kepada pengambil keputusan,
- Efektivitas pola dan bentuk partisipasi melalui sejumlah cara, seperti pertemuan-pertemuan rutin dan penggunaan teknologi informasi dalam menyelesaikan problem-problem di sekolah,
- Efisiensi pendekatan *Cek Sekolah-Ku* yang menggunakan sistem triangulasi dalam sosial audit,
- Efisiensi *Cek Sekolah-Ku* dalam mempercepat peningkatan/perbaikan layanan pendidikan.

c) Keberlanjutan

Saat evaluasi dilaksanakan penting juga untuk melihat dimensi keberlanjutan program. Di mana akan banyak sekali skenario yang ditawarkan jika program yang dilakukan selama hampir tiga tahun ini memberikan masukan pada pemangku kebijakan, penerima manfaat dan juga pembelajaran bagi pengelola program. Misalnya muncul peluang seperti adopsi program oleh pemerintah daerah atau kolaborasi dengan stakeholder lain dalam kerangka penguatan tata kelola pendidikan.

2 Konteks Program

Indonesia telah menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas pembangunan nasional. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan alokasi anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN secara keseluruhan di tingkat nasional dan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Hal ini untuk menjamin bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.



Namun, alokasi dana pendidikan yang besar saja tidak serta merta mampu memastikan terwujudnya perbaikan mutu pendidikan. Efektivitas pengelolaan dana pendidikan menjadi hal yang sangat krusial mengingat semakin besarnya anggaran, semakin menciptakan peluang korupsi. Dalam survei Global Corruption Barometer 2013¹, hampir separuh responden (49%) menganggap lembaga pendidikan di Indonesia korup, dan 21% responden menyatakan bahwa mereka, atau seseorang dalam rumah tangga mereka, telah membayar suap untuk layanan pendidikan.

Masalah utama dalam pengelolaan pendidikan adalah masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal yang tidak memadai, serta korupsi. Pejabat publik baik di nasional maupun di daerah sering memiliki diskresi kekuasaan yang terlampau luas, tanpa disertai akuntabilitas sumber daya dan mekanisme penegakan etik dan hukum yang tepat. Antara 2006-2015 lembaga penegak hukum

¹ Global Corruption Barometer, Transparency International, 2013

telah mampu menangkap sebanyak 618 orang sebagai tersangka kasus korupsi di sektor pendidikan dengan kerugian negara sebesar 1,3 triliun rupiah².

Situasi ini bisa dikatakan berhubungan dengan konteks yang lebih umum sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Di bawah rezim desentralisasi, anggaran pendidikan secara langsung disalurkan melalui BOS, BOP, dan skema DAK, sehingga ruang lingkup korupsi telah bergeser dari pusat ke pemerintah daerah. Pola berulang muncul dalam penyalahgunaan dana pendidikan oleh elit lokal dan pejabat pendidikan di pengadaan, ujian nasional, dan pendaftaran siswa, baik bekerja sama dengan aparat sekolah atau mitra bisnis.

Pihak inspektorat yang seharusnya mampu mencegah penyalahgunaan dana pendidikan sering kali tidak mampu menjangkau permasalahan yang muncul di satuan terendah. Sementara itu Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan cenderung hanya sebagai perwakilan birokrasi, tidak benar-benar merepresentasikan suara orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu pengawasan internal dan badan tambahan yang ada dalam pendidikan harus disertai dengan pengawasan eksternal oleh penerima manfaat sekolah, yaitu siswa, orang tua dan masyarakat luas.

Kebutuhan ini juga diperkuat dengan adanya program nasional Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang diejawantahkan dari pasal 50 (1) UU No 20/2003. MBS merupakan paradigma pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah untuk dapat mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan masing-masing. Ada tiga pilar MBS yang dapat dijadikan patokan untuk menilai implementasi MBS yang dilaksanakan oleh sekolah, yaitu Manajemen Sekolah, PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), serta Peran Serta Masyarakat.

Tatakelola sekolah yang baik akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, intervensi pihak ketiga dan korupsi, termasuk dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan legitimasi pemberian layanan publik karena layanan yang diberikan akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Tatakelola sekolah yang baik dapat terwujud bila aspek-aspek berikut terpenuhi:

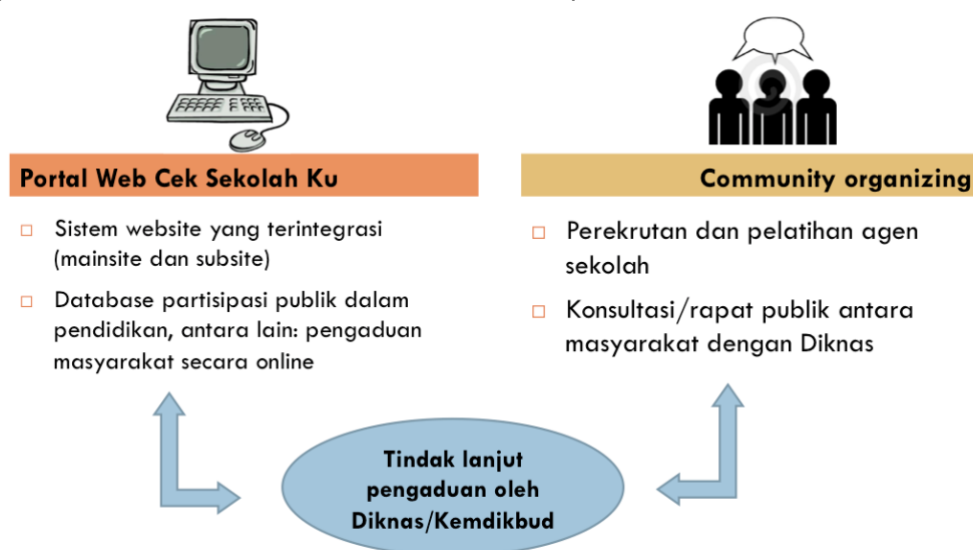
- Ada kepemimpinan yang berkomitmen kuat pada pelayanan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
- Masyarakat yang kritis dan mampu mengawasi sekolah.
- Kerja sama antara pemberi layanan dan penerima layanan dalam menemukan solusi.

² Tren Penyidikan Kasus Korupsi Sektor Pendidikan, Indonesia Corruption Watch, 2016.

2.1 Pengalaman Implementasi Cek Sekolah-Ku

Cek Sekolah-Ku mengajak siswa, guru, dan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan keuangan sekolah dan kegiatan belajar mengajar, serta berkomunikasi dengan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan.

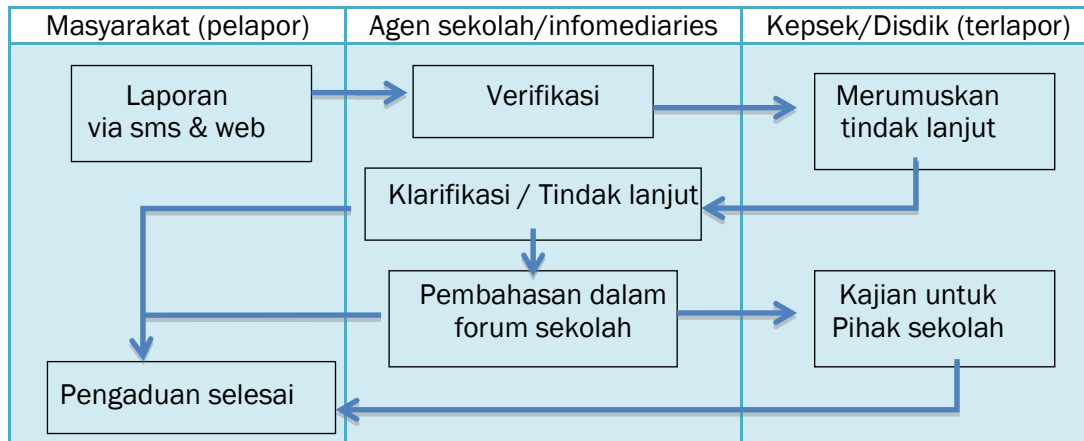
Kehadiran *Cek Sekolah-Ku* bermaksud membantu mengatasi persoalan-persoalan seputar transparansi anggaran dan akuntabilitas tata kelola sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan sekolah, dan penyelesaian berbagai masalah melalui mekanisme pengaduan secara *online*. Di samping itu, dilakukan pula pengorganisasian masyarakat, mulai dari siswa, guru, orang tua, serta masyarakat umum untuk dapat bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam forum-forum konsultasi publik.



Inisiatif Cek Sekolah-Ku berawal dari program serupa yang telah dilakukan sebelumnya di Filipina, dengan nama Checkmyschool, sejak tahun 2011. Informasi lebih lanjut dapat dibuka di <http://www.checkmyschool.org/>. Dalam desain awal program Cek Sekolah-Ku, TI-I bertemu dan berkonsultasi dengan ANSA-EAP untuk mengumpulkan informasi dan pengalaman. Cek Sekolah-Ku tergabung bersama dengan jaringan Checkmyschool negara-negara lain (Filipina, Mongolia, dan Cambodia) dalam Cross Country Learning Program.

Program *Cek Sekolah-Ku* di Indonesia berjalan mulai Oktober 2013 dengan dukungan dari SEATTI (*Southeast Asia Transparency and Technology Initiative*), dimulai dengan *piloting* di 15 (lima belas) sekolah yang tersebar di tiga daerah, yaitu Kota Semarang, Palangka Raya, dan Makassar.

Hal utama yang digali adalah munculnya *gap analysis* antara rencana kegiatan dan keuangan sekolah (RAPBS/RKAS) dengan laporan akhir (LPJ). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengaduan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai berikut.



- 1) Masyarakat mengirimkan laporan melalui *website*, SMS, *email*, dan formulir.
- 2) Laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu (paling lambat 5 hari) sebelum diunggah di *website*. Selanjutnya, laporan didisposisikan ke pihak sekolah/dinas terkait untuk menunggu tindak lanjut.
- 3) Pihak sekolah/dinas terkait merumuskan tindak lanjut dalam kurun waktu paling lambat 10 hari. Kemudian tindak lanjut diunggah di *website* dan diberitahukan ke pelapor melalui notifikasi dan SMS.

Saat pertama kali diluncurkan pada tahun 2014, respon yang muncul dari kebanyakan masyarakat adalah seputar kekhawatiran akan adanya ancaman jika melapor.

“Kami ingin memberi keluhan tapi takutnya ada pihak yang mengancam, jadi kami takut memberi pengaduan,” kata seorang siswa SMP di Semarang.

Hal-hal semacam ini sebenarnya telah diantisipasi dalam sistem *Cek Sekolah-Ku*. Sebagai bentuk perlindungan pelapor (*whistleblower protection*) masyarakat dapat memilih untuk mengirimkan pengaduan dengan menyembunyikan nama (anonim). Sedangkan untuk laporan melalui sms, 3 digit terakhir dari nomor pelapor akan disamarkan.

Di sisi lain, untuk memastikan validitas laporan yang masuk dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait dibuat mekanisme pengelolaan yang berjenjang mulai tingkat sekolah, kota/kabupaten, sampai nasional. Di tataran sekolah, beberapa siswa direkrut menjadi agen sekolah didampingi seorang guru. Agen sekolah berperan untuk melakukan pembaharuan data sekolah, mempromosikan kanal-kanal pelaporan *Cek Sekolah-Ku* dan mengelola laporan yang masuk di sekolahnya. Di tingkat kabupaten/kota, terdapat infomediaries yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengorganisasikan, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak warga sekolah seperti siswa, orang tua siswa, dan guru, serta dengan pihak sekolah dan Dinas

Pendidikan jika diperlukan. Infomediaries adalah pihak non pemerintah yang dapat menjembatani jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, ada KH2 Institute di Palangka Raya, Komunitas Skholatanpabatas di Makassar, dan Pattiro Semarang di Kota Semarang.

3 Hasil Monitoring dan Evaluasi

3.1 Rencana vs Capaian

Kehadiran *Cek Sekolah-Ku* bermaksud menyorot pokok permasalahan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan sekolah, serta penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan manajemen sekolah melalui mekanisme penanganan pengaduan. Sehingga hasil yang diharapkan yaitu:

- 1) Siswa, orang tua, guru, dan masyarakat menjadi sadar dan peduli dengan layanan sekolah dan isu-isu pendidikan.
- 2) Agen sekolah dan infomediaries mampu memfasilitasi proses pemantauan.
- 3) Siswa, orang tua, guru, dan masyarakat terlibat dalam memperbaiki kondisi sekolah dan pendidikan,
- 4) Pihak sekolah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 5) Otoritas pendidikan dan manajemen sekolah lebih transparan dan proaktif dalam memberikan informasi publik mengenai perencanaan sekolah, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban.
- 6) Pemerintah daerah dan nasional mengadopsi model *Cek Sekolah-Ku*, khususnya mekanisme penanganan pengaduan, untuk memperbaiki layanan pendidikan.

Memasuki periode tahun kedua (2015-2016) dengan dukungan MAVC (*Making All Voices Count*) dilakukan *scaling-up* yaitu penambahan jumlah sekolah, perluasan wilayah kerja, dan peningkatan *engagement* dengan pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal untuk menjamin adanya tindak lanjut yang lebih cepat dan responsif, serta menjadikan temuan yang masuk melalui *Cek Sekolah-Ku* sebagai bahan pengambilan keputusan.

Dari yang awalnya diterapkan di tiga kota; Semarang, Palangka Raya dan Makassar; kemudian diperluas di satu kabupaten yaitu Batang pada awal tahun 2016³.

Setelah hampir tiga tahun ini, capaian implementasi *Cek Sekolah-Ku* antara lain:

- 1) Terbangunnya kemitraan di tingkat nasional antara TII dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengenai “Perbaikan Tata Kelola Pendidikan melalui Program *Cek Sekolah-Ku* untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Sekolah Berbasis Masyarakat”. TII berperan untuk menghimpun dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam hal pemantauan sekolah melalui program *Cek Sekolah-Ku*, sedangkan Inspektorat berperan memberikan dukungan dalam pertukaran informasi dan komunikasi terkait perbaikan tata kelola pendidikan. Sebagai bagian dari pertukaran informasi, dilakukan

³ Daftar sekolah yang menerapkan *Cek Sekolah-Ku* dapat dilihat pada lampiran

kunjungan bersama TII dengan Itjen Kemdikbud ke salah satu daerah yang mengimplementasikan *Cek Sekolah-Ku*, yaitu Kota Semarang. Dalam kesempatan ini Irjen Kemdikbud Daryanto bersama Sekjen TII Dadang Trisasongko mengadakan kunjungan ke tiga sekolah yaitu SMPN 6, SMAN 1, dan SMKN 7 Semarang untuk berdiskusi mengenai pengelolaan *Cek Sekolah-Ku* di sekolah. Selain itu, Irjen juga mengisi seminar penguatan tata kelola pendidikan di harapan seluruh kepala sekolah SMP dan SMA/K kota Semarang.

- 2) Munculnya kemitraan serupa di tingkat lokal. Walikota Makassar melalui surat rekomendasi No. 483/222/HUMAS/X/2015 memberikan dukungan terhadap program *Cek Sekolah-Ku* dengan mewajibkan seluruh SMP dan SMA di Kota Makassar untuk berpartisipasi dan berperan aktif guna mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pencegahan korupsi. Sementara itu di Semarang, Dinas Pendidikan menandatangani kesepakatan bersama dengan Pattiwo Semarang yang menjadi dasar adopsi program *Cek Sekolah-Ku* di 47 sekolah (SMP, SMA, dan SMK).
- 3) Terbaharuinya data sekolah, yang meliputi profil, anggaran, dan pengaduan melalui portal <http://ceksekolahku.or.id>. Selain itu, portal juga dikembangkan dalam bentuk *mobile apps* (android) dan API (*Application Programming Interface*).
- 4) Terlaksananya forum-forum pertemuan rutin bulanan, antara siswa dengan guru atau kepala sekolah, antara orang tua murid dengan pemangku kepentingan, untuk membahas persoalan-persoalan yang muncul seputar kebijakan pendidikan. Bahkan di Semarang telah terbangun Forum Peduli Pendidikan yang tersebar di tiga kecamatan.

3.2 Relevansi

Cek Sekolah-Ku bekerja dalam kerangka tiga pilar, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi ini relevan dengan kebutuhan masyarakat di empat daerah yang tinggi terhadap keterbukaan informasi dari pelayanan pendidikan. Masyarakat sangat berharap sekolah-sekolah membuka informasi tentang RAPBS, BOS dan segala pengelolaan dana pendidikan. Keterbukaan di sekolah dimulai sejak penyusunan RAPBS sampai LPJ yang sudah dikomunikasikan bersama antar guru dan kepala sekolah, bahkan sampai pada siswa (OSIS) di beberapa sekolah. Kemudian RAPBS ini juga diinformasikan kepada orang tua murid secara periodik saat penerimaan rapor dan ditempel di papan pengumuman yang letaknya strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kehadiran *Cek Sekolah-Ku* dinilai memiliki nilai tambah sebagai berikut:

- 1) Ruang partisipasi, melancarkan komunikasi antara pihak penerima manfaat dan pihak pemberi layanan sekolah, dengan model tata kelola pengaduan/laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan tersistematis dapat melokasir pengaduan masyarakat.

- 2) Kontrol sosial, menumbuhkan gerakan bersama untuk aktif memantau proses pendidikan, untuk meningkatkan kenyamanan proses belajar-mengajar serta merangkul semua aspek/warga sekolah untuk sama-sama meningkatkan akuntabilitas sekolah.
- 3) Pendidikan karakter bagi siswa, menjadi sarana pendidikan dan latihan bagi siswa untuk mengutarakan pendapat secara bertanggung jawab.

Kota Semarang

Pada aspek keterbukaan, kebutuhan masyarakat telah disambut oleh Dinas Pendidikan yang mulai menggalakkan setiap sekolah untuk memperbarui RAPBS dalam bentuk RAPBS online.

Masyarakat Semarang secara umum bisa dikatakan cukup kritis, karena orang tua siswa pun turut andil dalam masyarakat dengan bergotong royong mengimplementasikan nilai-nilai *Cek Sekolah-Ku*. Diiringi dengan adanya Forum Peduli Pendidikan (FPP) sebagai forum bersama orang tua yang peduli terhadap kebijakan pendidikan.

Kehadiran FPP ini bermula dari keresahan masyarakat akan kerja komite sekolah yang kurang optimal. Para orang tua murid kemudian berkumpul mengorganisir diri ikut aktif berpartisipasi dan mengkritisi pendidikan di sekolah anak-anaknya. Terdapat tiga kecamatan yang sudah terbentuk FPP, yaitu Kecamatan Gunungpati, Rejomulyo, dan Candisari. Salah satu proses yang menjadi sorotan bagi FPP adalah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2015, dimana ditemukan beberapa persoalan seperti komponen penilaian sertifikat tambahan dan adanya jual beli kursi. Temuan ini telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang dan menjadi bahan masukan untuk perbaikan PPDB di tahun selanjutnya. FPP menjembatani komunikasi bagi para orang tua yang takut melapor karena khawatir mempengaruhi kegiatan belajar mengajar anaknya.

Di sisi lain, menurut hasil wawancara Pattiro Semarang, sekolah yang baik tidak dapat dilihat dari sedikitnya laporan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Belum tentu sedikitnya pengaduan maka pembangunan pendidikan sekolah tersebut telah berhasil begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, pemanfaatan *website Cek Sekolah-Ku* bukan sekedar mengenai pengaduan terkait pembangunan sekolah tetapi dapat pula menjadi wadah dalam menunjukkan prestasi sekolah dan hal-hal yang telah dicapai oleh sekolah tersebut terutama terkait pengelolaan anggaran yang berimbang.

Program *Cek Sekolah-Ku* sudah mampu melibatkan siswa maupun guru ditandai dengan adanya peningkatan respon/ sikap kritis oleh siswa, peningkatan kinerja, dan perbaikan infrastruktur fisik. Sosialisasi juga dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, menggunakan momentum pendidikan seperti penerimaan rapor dan masa orientasi siswa baru.

Dalam cakupan manajemen sekolah, pihak sekolah menjadi lebih peduli dengan kebutuhan siswa. Sebagian besar laporan yang masuk, utamanya seputar infrastruktur dan kegiatan belajar mengajar, telah ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dan jajarannya. Hasil audit sosial *Cek Sekolah-Ku* juga menjadi bahan pembahasan dalam forum kepeksek, guru, karyawan. Sedangkan untuk hal-hal yang terkait dengan anggaran, perlu peran Dinas Pendidikan untuk melakukan tindak lanjut yang konkret.

Kota Palangka Raya

Sebagai informasi, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi salah satu wilayah yang menjadi *pilot project Open Government Indonesia (OGI)*. Namun selama dua tahun implementasi *Cek Sekolah-Ku*, belum semua sekolah membuka akses informasi tersebut kepada masyarakat. Padahal syarat membuka informasi tersebut adalah amanat dari UU Sisdiknas dan Permendikbud 80/2015 tentang Juknis BOS. Sebenarnya sangat mudah untuk membuka informasi BOS dan RKAS, yakni dengan memajang RKAS di papan pengumuman atau menggunakan website sekolah. Contohnya di SMPN 1 Palangkaraya sudah berupaya membuka papan informasi tentang RKAS. Dengan membuka akses tersebut pihak sekolah yakin masyarakat menjadi lebih percaya dari sisi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, di SMPN 2 Palangka Raya malah ditemukan segala operasionalisasi BOS hanya diketahui oleh Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah.

Hal yang juga menjadi perhatian adalah di SMAN 2 Palangka Raya di mana meski dinobatkan sebagai salah satu sekolah favorit namun sekolah ini masih sangat tertutup dengan program *Cek Sekolah-Ku*. Alasan yang disampaikan adalah belum adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat. Di tambah pula birokrasi yang mengharuskan bahwa segala bentuk keterbukaan harus seizin dengan Dinas Pendidikan. Hal tersebut nampak dalam sesi wawancara yang menyatakan bahwa sekolah hanya membuka RKAS kepada Dinas Pendidikan dan orang tua siswa yang disampaikan kepada Komite Sekolah. Namun tidak dapat diverifikasi apakah Komite Sekolah menyampaikan kepada orang tua, apalagi sampai kepada masyarakat umum.

Masyarakat Palangka Raya secara umum bisa dikatakan pada posisi yang kurang kritis, sehingga orang tua siswa cenderung “menyerahkan” tanggung jawab persekolahan sehari-hari kepada pihak sekolah. Adapun keluhan terhadap sekolah biasanya langsung disampaikan kepada kepala sekolah. Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara ORI Kalteng, yakni masih sedikitnya laporan masyarakat terkait pelayanan pendidikan. Padahal di Kota ini sudah terkenal terdapat “syarat khusus” jika hendak masuk ke sekolah favorit.

Di Palangka Raya, dikarenakan faktor kurang intensifnya peran *infomediaries* kepada stakeholder orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya maka menyebabkan

kurangnya partisipasi warga masyarakat secara umum untuk terlibat aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan. Di sisi lain, sekolah juga belum menyediakan saluran/forum untuk membahas persoalan-persoalan pelayanan pendidikan secara sistematis. Saluran yang ada bersifat insidental dan cenderung tertutup, mengingat bahwa laporan/aduan yang bersifat buruk maka dianggap sebagai aib, sehingga aib pantang dibahas secara terbuka.

Respon dari Pemerintah Kota sangat minim diberikan kepada *Cek Sekolah-Ku*, kecuali hanya diketahui sebagai *event-event* pertemuan dan seminar belaka. Jadi pemerintah belum menganggap *Cek Sekolah-Ku* sebagai sebuah gerakan warga dalam mendorong tata kelola sekolah yang lebih baik. Meskipun Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi, namun hanya dilihat sebagai kegiatan-kegiatan kesiswaan.

Dalam temuan lapangan, SMPN 2, SMPN 1, SMKN 2 Palangka Raya sangat berharap bahwa program *Cek Sekolah-Ku* bisa memberikan nilai tambah bagi sekolah. Yakni berupa adanya model tata kelola pengaduan/laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan tersistematis, pendidikan karakter bagi siswa, dan juga memberikan *guidelines* pada keterbukaan dan pertanggungjawaban sekolah akan peran sertanya kepada masyarakat.

Kota Makassar

Bentuk transparansi di sekolah-sekolah kota Makassar adalah dengan membuka website sekolah dan membuka rancangan serta laporan keuangan melalui pengumuman sekolah yang strategis, membagikan secara periodik ke seluruh siswa. Dalam proses pembuatan RKAS juga melibatkan guru-guru untuk menyusun program bersama kepala sekolah dan bendahara.

Kebutuhan mengenai keterbukaan informasi sekolah secara *online* juga sudah disadari oleh sebagian besar kepala sekolah, terlebih Makassar sedang menuju ke *smart city*. Banyak masukan yang disampaikan melalui saluran/mechanisme yang lain, seperti kotak saran dan informasi langsung ke kepala sekolah. Berdasarkan konfirmasi dari siswa dan orang tua, masukan telah ditindaklanjuti dengan cara membuka kotak saran bersama-sama, menindaklanjuti secara langsung, dan mengumumkan lewat upacara.

Dalam konteks masyarakat secara umum terjadi penurunan kepedulian karena Peraturan Walikota mengenai SSPB (Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas) yang tidak dipahami secara utuh, hanya sebatas sumbangan sukarela, yang berimplikasi masyarakat cenderung acuh dan menganggap sekolah gratis. Namun dari segi komite sekolah, ditemui beberapa orang komite yang aktif mendatangi orang tua murid, ikut mengawasi sekolah sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, dan dapat dijadikan *keyperson* untuk membantu meluruskan pemahaman masyarakat.

Mengenai penanganan pengaduan, kepala sekolah menjawab langsung atau merapatkan dengan guru-guru, permasalahan yang muncul seputar kegiatan belajar mengajar. Meskipun Walikota Makassar telah memberikan dukungan dalam bentuk surat rekomendasi, Dinas Pendidikan Kota Makassar belum tampak berperan aktif memberi tanggapan dan menjadikan masukan masyarakat dalam *Cek Sekolah-Ku* sebagai bahan pengambilan keputusan.

Kabupaten Batang

Kondisi sekolah-sekolah di Batang secara umum sudah melakukan prinsip transparansi, dimana sekolah menginformasikan penggunaan dana ke orang tua baik melalui papan pengumuman maupun dalam forum pertemuan orang tua murid. Oleh sebab itu, ketika *Cek Sekolah-Ku* masuk, pihak sekolah mudah untuk menerima karena sudah sejalan dengan prinsip keterbukaan mereka. Sebagian besar sekolah juga telah menampilkan anggaran keuangan di website *Cek Sekolah-Ku*.

Arah terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan mulai muncul, dimana ruang-ruang partisipasi masyarakat dibuka dengan luas sehingga pihak penyelenggara pendidikan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Namun korelasi antara kedua aspek tersebut belum terlihat dalam waktu yang singkat ini.

Dalam kurun waktu sekitar 4 bulan setelah launching, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Terlihat dari kehadiran saat sosialisasi dan laporan yang masuk via platform. Di SMP 3 Batang, kanal *Cek Sekolah-Ku* juga di-embed di website sekolah. Sedangkan di SMA 1 Batang dan SMA 1 Wonotunggal, ada forum diskusi dalam menu website sekolah yang bisa diintegrasikan dengan *Cek Sekolah-Ku*. Di beberapa sekolah, seperti di SMP 7 Batang dan SMK 1 Batang, Kepala sekolah dan Wakil kepala sekolah sudah memfasilitasi mekanisme partisipasi masyarakat (siswa/ortu) dalam hal sarana dan prasarana.

Cek Sekolah-Ku mendorong keterbukaan di sekolah oleh semua pihak dan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh UPKP2 (Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) Kabupaten Batang. Sarana kontrol dan komunikasi yang diberikan *Cek Sekolah-Ku* ini berjalan dengan baik, dengan catatan informasi bertanggung jawab, perlu dikroscek sehingga tidak menyudutkan pihak sekolah dan tidak mencuat ke luar.

3.3 Efektivitas

Kota Semarang

Pada periode tahun kedua ini, masyarakat lebih kritis dalam menyampaikan apa yang menjadi perhatiannya. Mulai dari persoalan infrastruktur yang masih menjadi tren utama, kemudian mengarah ke persoalan yang lebih sensitif seperti anggaran dan kegiatan belajar mengajar. Secara umum, pihak sekolah sudah melakukan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Sementara porsi Dinas Pendidikan ada untuk memantau sejauh mana Kepala Sekolah aktif merespon partisipasi warga, dan menjadikan masukan *Cek Sekolah-Ku* sebagai bahan supervisi ke sekolah.

Penggunaan teknologi pada jenjang SMA dan SMK secara umum sudah cukup dimanfaatkan karena teknologi menawarkan kemudahan, kecepatan dan ketepatan waktu (*real time*) yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pengelolaannya. Hanya di SMA 3 Semarang belum termanfaatkan karena sosialisasi tidak optimal. Sedangkan bagi siswa/I SMP masih perlu pendampingan dari guru, seperti di SMPN 8 belum mampu memanfaatkan ICT, sebab ada kasus di masa lalu yang menimbulkan kewaspadaan pihak sekolah dalam penggunaan ICT untuk siswa. Sementara, pendampingan yang rutin dari guru di SMPN 6 dapat memberikan hasil yang optimal, dimana siswa juga dapat bercerita perbaikan-perbaikan layanan di sekolah melalui sarana ICT. Namun masih ada pengaduan yang terhambat dari anggaran baik dari Pemkot (dinas pendidikan) maupun pihak sekolah sehingga penyelesaian masalah masih cenderung lambat. Hal ini disiasati dengan diberikan rekapitulasi dan evaluasi secara berkala(*offline*).

Di Kota Semarang, forum pertemuan rutin diikuti oleh siswa beserta FPP yang terdiri dari orang tua. FPP beserta komite sekolah aktif dilibatkan dalam pertemuan multistaholder dengan Dinas Pendidikan dan DPRD Komisi Pendidikan. Masyarakat dapat menyampaikan apa yang menjadi perhatiannya dalam forum ini dan mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan, sehingga dalam forum Musrenbangdik masukan masyarakat yang muncul melalui *Cek Sekolah-Ku* dipertimbangkan, bahkan menjadi usulan yang diprioritaskan dalam Musrenbangdik yang diadakan per kecamatan. Misalnya pada tahun 2015, banyak masukan masyarakat mengenai ketersediaan toilet di sekolah yang masih minim, tidak proporsional rasionya dengan jumlah siswa. Dalam musrenbangdik, hal tersebut disampaikan dan masuk menjadi agenda prioritas Disdik Kota.

Kota Palangka Raya

Di Kota Palangka Raya laporan/aduan dari masyarakat sangat minim, dan bisa dikatakan cenderung menurun dari tahun pertama ke tahun kedua. Hal ini bukan karena pelayanan publik dan tata kelola sekolah yang menjadi lebih baik. Namun dikarenakan

oleh kurangnya/minimnya sosialisasi *Cek Sekolah-Ku* di Kota ini, sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana harus melapor dan dialamatkan kemana laporan tersebut.

Pemko dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak merespon dengan baik setiap aduan, sebab respon tersebut langsung dialamatkan pada Kepala Sekolah. Di sisi lain meskipun Dinas Pendidikan secara terbuka memberikan surat rekomendasi bagi sekolah-sekolah *pilot project Cek Sekolah-Ku* namun tidak ada *follow up* konkrit dalam mendukung *Cek Sekolah-Ku* sebagai gerakan warga. Sikap pasif dari Dinas Pendidikan ini disinyalir karena tersumbatnya komunikasi *infomediaries* dengan pihak Dinas.

Siswa dan sekolah (guru dan Kepala Sekolah) di SMPN 1 dan SMKN 2 sangat menyambut positif dalam pemanfaatan ICT, sebab faktor kemudahan dan cepat menjadi pertimbangan dalam pengelolaannya. Namun hal ini tidak sejalan dengan model penyelesaiannya. Di mana Pemko (Dinas Pendidikan) dan Kepala Sekolah tidak mempunyai mekanisme tanggapan.

Forum pertemuan rutin masih sebatas diikuti oleh siswa. Keterlibatan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan bisa dikatakan tidak *supportive* pada kondisi ini. Karena nihilnya keterlibatan Pemerintah, maka model gerakan kewargaan seperti *Cek Sekolah-Ku* di Kota Palangka raya tidak berjalan secara efektif, kecuali dukungan dalam bentuk per kegiatan.

Kota Makassar

Masukan dari masyarakat meningkat, tidak terbatas pada kanal-kanal yang disediakan oleh *Cek Sekolah-Ku*. Mekanisme seperti kotak saran masih aktif dan efektif digunakan, bahkan di SMA 16 ada beberapa kotak saran yang dipasang di titik-titik strategis yang dekat dengan kerumunan siswa, seperti dekat kantin, pintu gerbang, dan ada di tiap lantai. Isi laporan masyarakat kebanyakan berupa infrastruktur, kegiatan belajar mengajar, dan kenakalan siswa. Kepala sekolah dan wakasek telah melakukan tindak lanjut baik dengan menjawab masukan melalui platform, maupun memberikan pengumuman kepada warga sekolah, melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur, serta melakukan pembinaan kepada siswa dan guru.

Ditinjau dari platform pelaporan menggunakan ICT, masyarakat masih lebih banyak yang menggunakan mekanisme SMS ketimbang website dan mobile apps. SMS dianggap paling mudah oleh masyarakat. Di samping itu, kanal-kanal non ICT seperti kotak saran juga masih efektif utamanya bagi siswa.

Belum ada forum yang dibentuk secara khusus dan dapat bertemu secara reguler multistakeholder. Adanya pergantian birokrasi, seperti Kepala Dinas Pendidikan yang berganti pada tahun 2015 dan pergantian besar-besaran kepala sekolah melalui lelang jabatan pada awal tahun 2016 menyebabkan *infomediaries* agak kesulitan mencari

keyperson stakeholder. Beberapa pertemuan evaluasi hanya dapat melibatkan guru, siswa, masyarakat, dan jurnalis.

Secara eksplisit belum terlihat karena peran Dinas Pendidikan Kota Makassar masih lemah. Memasuki tahun kedua program *Cek Sekolah-Ku*, terjadi pergantian birokrasi di Dinas Pendidikan, termasuk Kepala Dinas dan Kabid Dikdasmen. Rekomendasi yang diberikan oleh Walikota terkait *Cek Sekolah-Ku* baru diturunkan oleh Dinas Pendidikan dalam bentuk dukungan moral, belum sampai tataran implementatif.

Kabupaten Batang

Setelah di-launching dan dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, antusiasme masyarakat mulai bermunculan melalui kanal-kanal yang disediakan oleh *Cek Sekolah-Ku*. Banyak dari sms, akan ditingkatkan penggunaan kotak saran dan jalur telepon. Responsivitas stakeholder belum nampak secara konkret karena durasi implementasi program yang masih relatif baru. Namun jika dilihat dari tren laporan yang masuk, pihak sekolah sudah mulai menindaklanjuti. Infomediaries akan melakukan evaluasi bersama untuk mengecek sejauh mana tingkat responsivitas sekolah masing-masing.

Mengenai penggunaan kanal ICT, paling banyak adalah melalui SMS, kemudian menyusul website dan mobile apps. Respon pemangku kebijakan juga sudah diberikan melalui kanal ICT. Meskipun ditemui beberapa kendala teknis, tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan pendampingan dari infomediaries.

Multistakeholder forum belum terbentuk karena sejauh ini tahap program masih pada peningkatan partisipasi masyarakat, namun dari hasil diskusi dengan Dinas Pendidikan Kab. Batang, forum ini dapat diinisiasi melalui pertemuan kepala sekolah dan warga untuk mensosialisasikan peraturan bupati mengenai pengelolaan anggaran di sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Batang sangat terbuka. Akses *Cek Sekolah-Ku* juga telah diberikan kepada Disdik, dan pihak dinas akan menggunakan masukan masyarakat tersebut sebagai bahan supervisi ke sekolah-sekolah.

3.4 Efisiensi

Secara keseluruhan, implementasi program *Cek Sekolah-Ku* di 4 daerah mampu di-cover dengan rancangan anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan melalui kontrak kepada *infomediaries*. Adapun faktor pendukung dari tingkat nasional yang membantu terlaksananya program adalah adanya MoU antara TII dengan Itjen Kemdikbud. Di samping itu, faktor-faktor di lapangan, baik dari segi stakeholder maupun masyarakat, juga ikut mempengaruhi implementasi *Cek Sekolah-Ku*.

Kota Semarang

Sepanjang tahun 2015 merupakan masa transisi pengelolaan program dari infomediaries kepada Dinas Pendidikan. Dalam proses *scaling-up* di Kota Semarang, awalnya ditemukan kesulitan sebab perluasan sekolah yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan mencapai hampir 10 kali lipat dari piloting awal, yaitu yang tadinya hanya 5 sekolah menjadi 47 sekolah. Infomediaries merasa kewalahan dan perlu penambahan personil, sedangkan program tidak sampai pada target sejauh itu. Kemudian hal ini disiasati dengan cara infomediaries melakukan pendampingan intensif kepada 9 sekolah, sedangkan sisanya dilakukan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan.

Agen sekolah, khususnya guru mendapat SK penunjukan dari Dinas Pendidikan, yang menyatakan bahwa wakasek humas berperan dalam pengelolaan *Cek Sekolah-Ku*. Evaluasi bulanan rutin dilakukan dengan para guru agen sekolah ini. Dari sembilan sekolah yang didampingi rutin, sebagian besar sudah menunjukkan peran dan fungsinya, hanya beberapa sekolah yang belum optimal yaitu SMA 3 dan SMP 8. Sementara siswa secara umum sudah mampu bergerak dan menggerakkan siswa-siswa lainnya, melalui OSIS, bahkan di beberapa sekolah, yaitu SMA 12 dan SMA 1, siswa MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) juga diajak bekerjasama. Siswa sangat antusias pada gerakan *Cek Sekolah-Ku*, hal ini sangat bisa ditunjukkan dari tingkat partisipasi pada pertemuan bulanan antara *infomediaries* dengan agen sekolah serta penyebaran informasi kepada siswa sebaya ataupun adik kelas.

Faktor pendukung:

- Adanya penerimaan dan adopsi program dari Disdik Kota Semarang
- Ada korelasi isu dan fokus pendidikan dengan wilayah advokasi infomediaries (Pattiro Semarang)
- Ada inisiatif pendukung yang muncul di tingkat sekolah, seperti penyuaran aspirasi siswa lewat OSIS dan MPK, serta ruang-ruang diskusi yang dibuka oleh kepala sekolah untuk seluruh warga sekolah

Faktor penghambat:

Meskipun MoU sudah dimulai pada awal tahun 2015, belum tampak peran Disdik secara menyeluruh untuk mensosialisasikan komitmen ini. Oleh sebab itu, infomediaries memfokuskan pendampingan pada 9 sekolah yang dilihat mempunyai peluang dan kooperatif. Sepanjang tahun 2015 menjadi masa transisi yang diharapkan pada tahun 2016 Dinas Pendidikan Kota Semarang dapat mengelola *Cek Sekolah-Ku* secara mandiri dan integral dengan program dinas.

Kota Palangka Raya

Pada fase pertama implementasi *Cek Sekolah-Ku* seluruh target asistensi dan sosialisasi pada sekolah pilot project dapat terlaksana dengan baik. Di mana sosialisasi dilakukan secara masih mulai dari kunjungan lapangan dari infomediaries ke sekolah-sekolah

hingg publikasi alat peraga kampanye untuk mendukung *Cek Sekolah-Ku*. Namun pada fase kedua, di mana *scaling-up* dilakukan terdapat kendala teknis di lapangan, antara lain adalah adanya bencana kabut asap yang turut mempengaruhi implementasi *Cek Sekolah-Ku*. Di mana banyak sekolah diliburkan dan waktu untuk asistensi ke sekolah menjadi tidak ada.

Di fase pertama *Cek Sekolah-Ku* diimplementasikan sangat mendapatkan dukungan internal kelembagaan dari mitra infomediaries di Palangka Raya, yakni KH2 Insitute, dengan berjalannya supervisi kelembagaan terhadap *infomediaries* untuk melaksanakan program-program yang telah terjadwal. Namun pada fase kedua dukungan kelembagaan kepada infomediaries sangat berkurang drastis, dimana *infomediaries* bekerja sendirian dalam mengelola *Cek Sekolah-Ku*. Secara kuantitas ini jelas tidak memungkinkan implementasi *Cek Sekolah-Ku* dijalankan sesuai harapan.

Di sisi lain, infomediaries di Palangka Raya juga kurang tanggap dalam merespon itikad dari Pemerintah Kota (Dinas Pendidikan). Kurang aktifnya *infomediaries* melakukan pendekatan (advokasi) kepada Dinas merupakan salah satu faktor penghambat bagi implementasi *Cek Sekolah-Ku* di Palangka Raya. Selain hal tersebut, secara birokrasi Transparency International Indonesia melalui MoU dengan Inspektorat Jenderal Kemdikbud juga tidak tersosialisasi di Palangka Raya, karena faktor kealpaan.

Di sisi yang hampir sama, minimnya kunjungan lapangan (ke sekolah-sekolah) dari *infomediaries* juga disinyalir menjadi salah satu faktor mengapa sekolah masih belum paham dan mengerti tentang program-program *Cek Sekolah-Ku*. Sementara itu agen sekolah di SMKN 2 Palangka Raya dan SMPN 2 Palangka Raya sangat antusias pada gerakan *Cek Sekolah-Ku*, hal ini sangat bisa ditunjukkan dari tingkat partisipasi pada pertemuan bulanan antara *infomediaries* dengan agen sekolah. Namun lagi-lagi *infomediaries* gagal melakukan *follow-up* pada hasil pertemuan bulanan.

Pada dasarnya menurunnya kualitas program *Cek Sekolah-Ku* pada fase kedua bukanlah pada faktor desain *scaling-up*, namun lebih kepada kurang rajinnya *infomediaries* dalam melakukan advokasi dan asistensi kepada Pemko (Disdik) dan juga kepada sekolah.

Faktor pendukung:

- Adanya penerimaan dari Disdik
- Adanya dukungan dari ORI Kalteng

Faktor penghambat:

- Kurang rajinnya infomediaries dalam melakukan advokasi dan asistensi
- Kurangnya komunikasi antara infomediaries (dan lembaga KH2 Insitute) dengan Pemko (Disdik)
- Kurangnya pemahaman tentang *Cek Sekolah-Ku* dari pihak Pemko, Disdik dan sekolah-sekolah.

Kota Makassar

Perkembangan yang paling maju muncul dari sisi *supply* dengan adanya dukungan dari Walikota, sedangkan dari sisi *demand* yaitu siswa-siswa agen sekolah yang mampu melakukan regenerasi rutin secara mandiri. Infomediaries berperan sangat aktif dalam mendampingi sekolah, baik pada kepala sekolah maupun agen sekolah. Serta menjalin kemitraan dengan Walikota dan Dinas Pendidikan. Namun capaian yang dianggap paling sulit oleh infomediaries adalah menjaga komitmen birokrasi, tetapi di akhir program bertepatan dengan terpilihnya kepala-kepala sekolah baru melalui lelang jabatan, justru menimbulkan semangat dan antusiasme tersendiri yang mendukung terlaksananya program.

Ada perbedaan karakter antara siswa agen sekolah SMP dan SMA, dimana agen sekolah tingkat SMA dapat melakukan kegiatan secara mandiri, sedangkan agen sekolah tingkat SMP masih perlu pendampingan intensif baik dari guru pendamping maupun infomediaries.

Faktor pendukung:

- Adanya penerimaan dari Walikota Makassar
- Desain program yang fleksibel, baik dari segi pengaturan kegiatan maupun pengelolaan dana, memudahkan infomediaries dalam mengatur alur kerja yang sesuai dengan kondisi lapangan

Faktor penghambat yang menjadi tantangan utama adalah komitmen birokrasi, dikarenakan dalam dua tahun ini terjadi pergantian yang cukup signifikan baik di tataran kota maupun sekolah melalui lelang jabatan, terjadi pergantian pada kepala dinas dan semua kepala sekolah, sehingga diperlukan pendekatan yang berulang kepada stakeholder tersebut.

Kabupaten Batang

Dalam kurun waktu yang relatif singkat (satu semester), target program secara kuantitatif dapat tercapai, misalnya jumlah sekolah dan jumlah partisipasi masyarakat yang masuk. Namun mengenai target kegiatan, masih belum optimal, seperti sosialisasi yang belum massif dan pertemuan multistakeholder yang belum secara rutin dilakukan.

Infomediaries telah melakukan fungsinya, baik pendampingan agen sekolah, advokasi ke Dinas, dan monitoring penggunaan ICT. Yang perlu ditingkatkan adalah intensitas pendampingan infomediaries masuk ke sekolah-sekolah, seperti di SMKN 1 Batang yang sudah menyampaikan secara terbuka bahwa Laskar Batang bisa menjadi narasumber di pelatihan-pelatihan yang melibatkan siswa. Begitu pula sekolah-sekolah yang lainnya.

Faktor pendukung:

Adanya dukungan dari bupati yang kemudian ditunjukkan secara konkret oleh Dinas Pendidikan, bahkan Disdik berencana untuk memperluas sekolah implementasi *Cek Sekolah-Ku*

Faktor penghambat:

Sosialisasi yang belum menyeluruh dan massif, sehingga masyarakat luas belum banyak yang mengetahui

3.5 Keberlanjutan

Kota Semarang

Sekolah-sekolah yang menjadi piloting *Cek Sekolah-Ku* sebagian besar menyampaikan bahwa kehadiran *Cek Sekolah-Ku* tetap layak untuk dilanjutkan sebagai sebuah ikhtiar gerakan yang mendorong tata kelola pendidikan yang baik.

Melalui kesepakatan bersama (MoU) yang dibangun antara Dinas Pendidikan Kota dengan Pattiro Semarang, Disdik membuka akses *Cek Sekolah-Ku* kepada 47 sekolah yang tercakup dalam MoU tersebut. Pengelola utama Disdik ada di bagian monitoring dan pengembangan bekerja sama dengan pengawas sekolah untuk menjadikan *Cek Sekolah-Ku* sebagai bagian dari supervisi sekolah. Peran infomediaries yang berasal dari CSO lokal sebagai fasilitator.

Dalam dua tahun perjalanan *infomediaries* di kota Semarang, pengorganisasian terhadap agen sekolah telah terkoordinasi baik oleh siswa/i melalui FKO (Forum Komunikasi OSIS), hanya pada SMAN 3 Semarang dimana informasi terputus pada guru serta sebagian pengurus OSIS. Keterlibatan masyarakat juga aktif dikelola dengan pengembangan forum peduli pendidikan yang tadinya berada di 2 kecamatan (Gunungpati dan Rejomulyo), bertambah 1 kecamatan Candisari. Hal yang perlu ditingkatkan adalah regenerasi aktif siswa agen sekolah dan transfer informasi secara rutin kepada orang tua murid mengenai peraturan/kebijakan yang terkait dengan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kapasitas mereka.

Kota Palangka Raya

Di kota Palangka Raya bisa dikatakan sangat minim dukungan kelembagaan yang datang dari masyarakat sipil. Apalagi dari pemko bisa dikatakan nihil. Sehingga proses tata kelola pendidikan yang baik yang menjadi program *Cek Sekolah-Ku* bisa dikatakan tidak memperoleh tempat yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Namun dari hasil wawancara dengan infomediaries dari KH2 Insitute merasakan bahwa kehadiran *Cek Sekolah-Ku* tetap layak untuk dilanjutkan sebagai sebuah ikhtiar gerakan yang mendorong tata kelola pendidikan yang baik.

Dalam dua tahun perjalanan infomediaries di Kota Palangka Raya melakukan pengorganisasian terhadap agen sekolah yang nota bene adalah siswa/i. Keterlibatan masyarakat masih rendah, karena warga masih menganggap bahwa isu-isu pendidikan adalah tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Namun aktifitas siswa/i yang sudah dilatih dan mengikuti pertemuan bulanan menunjukkan hasil yang baik, di mana mereka menjadi terlatih untuk menyampaikan masukan yang mendorong perbaikan kualitas tata kelola sekolah.

Belum terakomodirnya *Cek Sekolah-Ku* ke pemerintah setempat menjadi sulit untuk mencari peluang keberlanjutan proses implementasi *Cek Sekolah-Ku* di Palangka Raya.

Kota Makassar

Kehadiran surat rekomendasi walikota kepada semua sekolah sebetulnya cukup sakti, tetapi belum bisa diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan karena adanya pergantian birokrasi yang cukup signifikan. Sehingga sejauh ini mitra infomediaries, yaitu Skholatanpabatas, berkomitmen untuk tetap membawa kegiatan ini secara mandiri. Bahkan saat ini, sudah ada 2 tambahan sekolah yang berminat bergabung di *Cek Sekolah-Ku*, yaitu SD Inpres Mamajang dan SMPN 23 Makassar.

Kelompok warga yang terlihat paling menonjol dapat mengorganisir diri secara mandiri adalah siswa (para agen sekolah). Secara periodik tiap tahun ada regenerasi agen sekolah yang biasanya berbarengan dengan pergantian pengurus OSIS. Beberapa komite sekolah juga mulai terlihat menonjol, ditemui komite sekolah yang tergabung dalam Forum Komite Sekolah Makassar yang turut memberi masukan dalam penyusunan perwali mengenai SSPB.

Kabupaten Batang

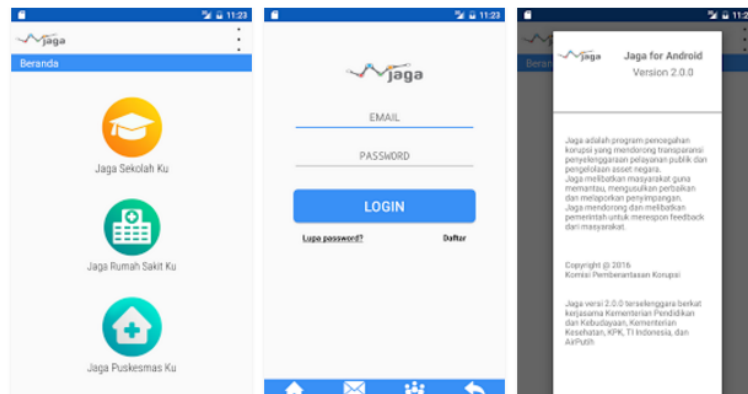
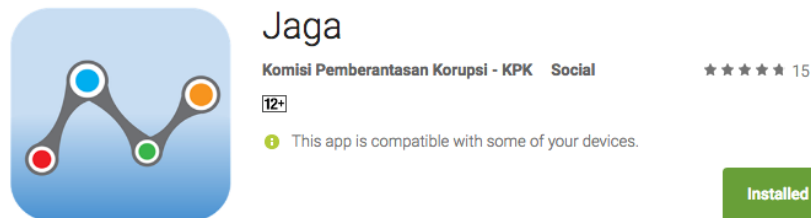
Dalam wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, disampaikan bahwa dalam waktu dekat Disdik akan mengeluarkan surat edaran/rekomendasi kepada sekolah-sekolah yang terlibat di *piloting* ini guna memberikan legitimasi. Dari awal Disdik terbuka dan memberikan peluang *Cek Sekolah-Ku* dapat diperluas jangkauannya, tetapi kendala ada pada bidang Dikmen (Pendidikan Menengah) yang pada tahun 2017 akan berpindah kewenangan ke tingkat provinsi.

Dalam training dan sosialisasi, sebagian siswa dan orang tua sudah mampu menggunakan dan menyampaikan masukan lewat *Cek Sekolah-Ku*. Muncul aktor-aktor masyarakat yang aktif, sebagian dari komite sekolah, sebagian dari orang tua murid biasa. Mitra infomediaries pun berkomitmen untuk melanjutkan pendampingan program secara mandiri dan advokasi kepada Dinas Pendidikan.

Adopsi Program di Tingkat Nasional oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya bidang pencegahan mempunyai perhatian khusus terhadap keterbukaan pelayanan publik, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perizinan. KPK melakukan integrasi data layanan publik tersebut dalam satu kanal sehingga komprehensif data profil, anggaran, dan masyarakat bisa berpartisipasi aktif. Dalam bidang pendidikan, model pendekatan dan aplikasi *Cek Sekolah-Ku* dijadikan acuan (*baseline*) karena mempunyai kelebihan dalam memasukkan data anggaran tiap-tiap sekolah serta konsisten mewadahi partisipasi masyarakat (lewat *Complaint Handling Mechanism* dan pertemuan-pertemuan rutin).

Hasil adopsi aplikasi *Cek Sekolah-Ku* ini dinamakan JAGA, yang tersedia dalam bentuk aplikasi *mobile* (android). *Soft launching* JAGA telah dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016, dengan piloting di kota-kota yang sebelumnya menjadi daerah implementasi *Cek Sekolah-Ku*. Program JAGA KPK ini masih dalam tahap pengembangan yang direncanakan akan diperluas sampai ke 300 kota pada tahun 2017.



4 Kesimpulan

- *Cek Sekolah-Ku* menjadi jembatan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap keterbukaan informasi pendidikan. Setelah implementasi *Cek Sekolah-Ku*, perubahan muncul dimana sekolah-sekolah menjadi lebih terbuka dan tidak alergi dengan istilah transparansi.
- Ruang-ruang partisipasi warga mulai terbuka. Warga disini tidak hanya masyarakat umum dan orang tua, tetapi juga para siswa mulai belajar peduli, kritis, dan bertanggung jawab berpendapat. Mekanisme *complaint handling Cek Sekolah-Ku* baik melalui instrumen teknologi (SMS, website, mobile apps) maupun kotak saran digunakan secara optimal.
- Kehadiran *Cek Sekolah-Ku* sebagai pendorong sehingga banyak muncul inisiatif pemerintah yang mengarah pada terciptanya akuntabilitas layanan pendidikan, seperti RAPBS *online* dan SSPB.
- Keberlangsungan *Cek Sekolah-Ku* di daerah bergantung pada aktor-aktor lokal, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi stakeholder, adanya legalitas baik dalam bentuk MoU, SK, dan adopsi program mempermudah percepatan transparansi di sekolah-sekolah. Sementara itu masyarakat yang kritis dan peduli dapat memunculkan forum-forum dan komunitas yang berjalan secara massif dan konsisten.
- Dukungan dari tingkat nasional, baik dari tataran Kemendikbud maupun KPK, meskipun tidak langsung dapat diturunkan ke daerah karena otonomi daerah masing-masing, namun dapat menjadi dorongan yang kuat untuk memperluas *Cek Sekolah-Ku* di wilayah lain.

5 Rekomendasi

Mendorong tata kelola pendidikan yang baik melalui *Cek Sekolah-Ku* setidaknya dapat berjalan jika didukung oleh tiga aspek utama, yaitu pemanfaatan teknologi, kemitraan dengan pemerintah, dan pengorganisasian masyarakat.

Teknologi membantu menyediakan sarana yang memudahkan komunikasi dua arah antara pemangku kepentingan dan penerima manfaat, dalam hal ini untuk mendapatkan masukan dari masyarakat yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas di sekolah dan instansi pendidikan.

Kemitraan dengan pemerintah dijalin dalam posisi yang setara dan masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah, dalam hal ini Dinas/Kementerian. Hal yang perlu diatur lebih lanjut adalah pembagian peran, dan memastikan keberlanjutan dari proses kemitraan ini. Masyarakat sipil melalui *Cek Sekolah-Ku* telah menjalin kemitraan dengan Kemdikbud dan Dinas Pendidikan di tingkat kota/kabupaten. Terkait dengan implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada pelimpahan wewenang pendidikan menengah ke tingkat provinsi, diperlukan advokasi lebih lanjut terhadap Dinas Pendidikan Provinsi.

Di sisi lain, pengorganisasian masyarakat menjadi modal utama pengawasan berbasis masyarakat. Sehingga peningkatan kepedulian masyarakat dapat berjalan sesuai kebutuhan akan sektor pendidikan. Keterlibatan masyarakat yang difasilitasi dan diakui oleh pihak sekolah membuat sekolah tidak lagi dikuasai hanya oleh golongan tertentu, melainkan menjadi milik bersama.

Lampiran

Daftar sekolah yang terlibat di *Cek Sekolah-Ku*

Semarang *)

1. SMAN 1
2. SMAN 2
3. SMAN 3
4. SMAN 4
5. SMAN 5
6. SMAN 6
7. SMAN 7
8. SMAN 8
9. SMAN 9
10. SMAN 10
11. SMAN 11
12. SMAN 12
13. SMAN 13
14. SMAN 14
15. SMAN 15
16. SMAN 16
17. SMKN 1
18. SMKN 2
19. SMKN 3
20. SMKN 4
21. SMKN 5
22. SMKN 6
23. SMKN 7
24. SMKN 8
25. SMKN 9
26. SMKN 10
27. SMKN 11
28. SMPN 1
29. SMPN 11
30. SMPN 12
31. SMPN 16
32. SMPN 2
33. SMPN 20
34. SMPN 22
35. SMPN 27
36. SMPN 28
37. SMPN 3
38. SMPN 37
39. SMPN 39
40. SMPN 4
41. SMPN 40
42. SMPN 41
43. SMPN 5
44. SMPN 6
45. SMPN 7
46. SMPN 8
47. SMPN 9

Palangka Raya

1. SMAN 1
2. SMAN 2
3. SMAN 4
4. SMKN 1
5. SMKN 2
6. SMPN 1
7. SMPN 2
8. SMPN 3

Makassar

1. SMAN 1
2. SMAN 5
3. SMAN 16
4. SMAN 19
5. SMPN 2
6. SMPN 18
7. SMPN 27
8. SMPN 30
9. SMPN 23

Batang

1. SMAN 1 Batang
2. SMAN 1
Wonotunggal
3. SMKN 1 Batang
4. SMPN 3 Batang
5. SMPN 3 Subah
6. SMPN 7 Batang

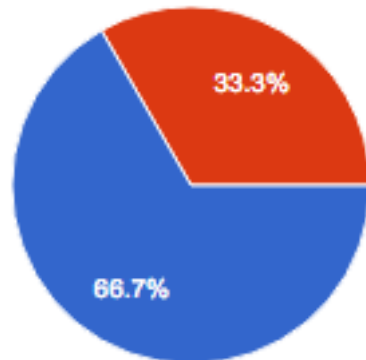
*) Perluasan implementasi *Cek Sekolah-Ku* di Semarang merupakan komitmen adopsi program oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang

Mini Riset Good School Governance

Indikator sederhana mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi ini diujicobakan pada pihak-pihak/komunitas yang telah bergabung di *Cek Sekolah-Ku* periode tahun pertama (2014-2015). Wawancara dilakukan pada bulan Agustus-September 2015. Total responden sebanyak 55 orang tersebar di 3 kota; Semarang, Palangka Raya, dan Makassar.

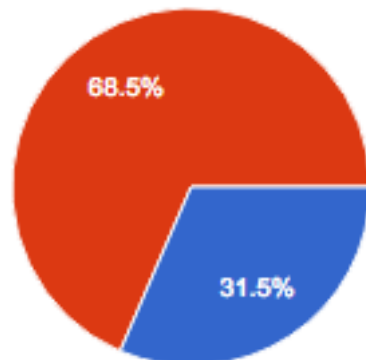
Transparansi

1.1. Adakah regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi?



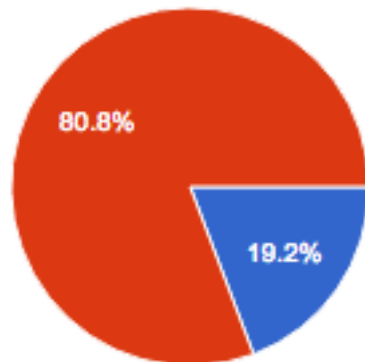
Sebagian besar responden (66,7%) menyatakan pengetahuannya mengenai regulasi yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.2. Adakah regulasi di tingkat lokal yang mengatur keterbukaan informasi?



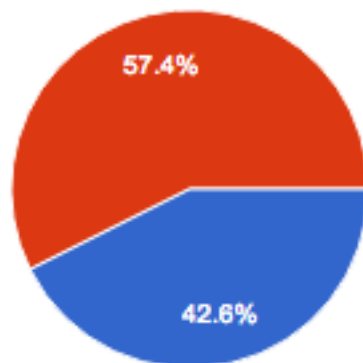
Sebagian besar (68.5%) menyatakan ketidaktahuannya mengenai regulasi lokal yang mengatur keterbukaan informasi. Sebagian kecil (31.5%) yang menyatakan ada regulasi yaitu berupa Peraturan Walikota tentang PPID di Kota Semarang dan Peraturan Daerah tentang PIP di Kalimantan Tengah.

1.3. Adakah regulasi khusus di tingkat sekolah yang mengatur keterbukaan informasi?



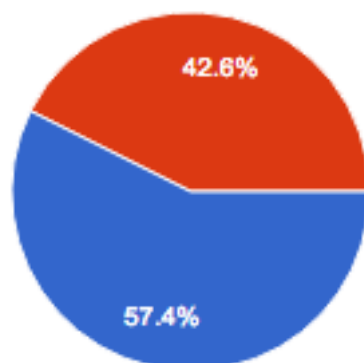
Sebagian besar (80.8%) menyatakan tidak ada peraturan khusus di tingkat sekolah mengenai keterbukaan informasi.

1.4. Adakah lembaga yang berwenang yang diatur oleh UU untuk implementasi regulasi keterbukaan informasi?



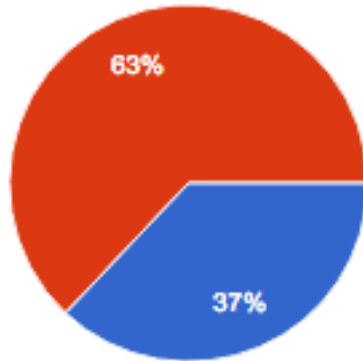
Hampir setengah dari total responden (42.6%) menyebutkan bahwa Komisi Informasi dan SKPD, dalam hal ini Dinas Pendidikan, dengan PPID yang berwenang mengimplementasikan keterbukaan informasi.

1.5. Adakah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan informasi?



Lebih dari setengah total responden (57.4%) menyebutkan SKPD (melalui PPID dan PIP), biro humas, kantor kecamatan dan kelurahan sebagai lembaga yang memberikan layanan informasi

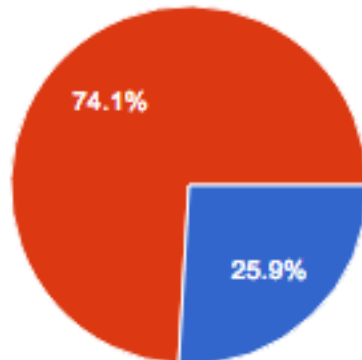
1.6. Adakah lembaga khusus yang dibentuk oleh sekolah untuk memberikan layanan informasi?



Hanya 37% responden yang mengetahui lembaga khusus di tingkat sekolah, yaitu melalui bagian humas dan kesiswaan (OSIS). Sisanya menyebutkan bahwa informasi hanya disampaikan saat pengambilan rapor dan menjelang ujian

Akuntabilitas

2.1. Adakah regulasi (nasional, daerah, sekolah) untuk membuka informasi?

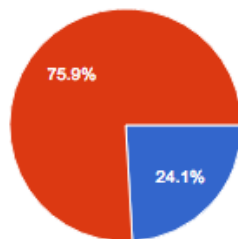


Hanya sebagian kecil responden (25.9%) yang mengetahui bahwa UU KIP mewajibkan sekolah untuk membuka informasi

2.2. Apakah praktek keterbukaan informasi sekolah sudah berjalan?

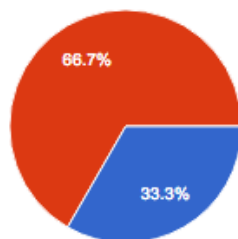
Setengah lebih responden (57.4%) menyatakan keterbukaan informasi sekolah belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari:

2.2.1. Apakah RKAS dibuka setiap tahun?



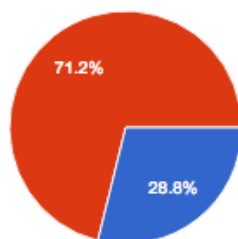
YA	13	24.1%
TIDAK	41	75.9%

2.2.2. Apakah RAPBS dibuka setiap tahun?



YA	18	33.3%
TIDAK	36	66.7%

2.2.3. Apakah LPJ dibuka setiap tahun?



YA	15	28.8%
TIDAK	37	71.2%

Selain RKAS, RAPBS, LPK, sekolah membuka dokumen-dokumen berikut:

- profil, program, dan prestasi sekolah
- laporan dana BOS
- data penerima beasiswa, misalnya BSM
- laporan OSIS

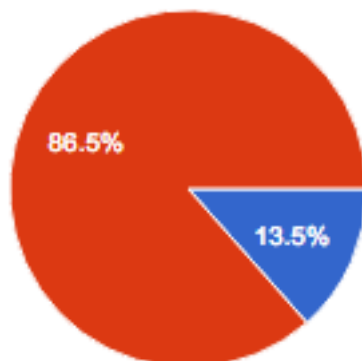
2.3. Bagaimana bentuk praktek dari keterbukaan informasi di sekolah?

- Papan informasi dan pengumuman
- surat pemberitahuan ke orang tua
- Informasi saat pertemuan/rapat orang tua murid dan guru
- Informasi ke siswa saat upacara bendera
- RAPBS online (baru di beberapa sekolah)

2.4. Bagaimana mekanisme pembaruan informasi sekolah?

Melalui papan informasi/pengumuman serta melalui pertemuan-pertemuan, tetapi belum rutin dilakukan

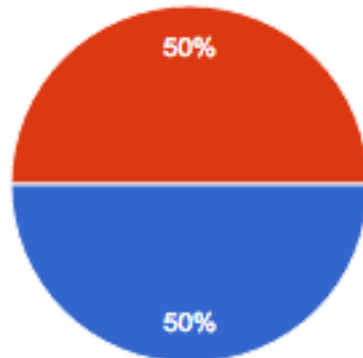
2.5. Adakah mekanisme (SOP) yang mengatur tentang keterbukaan informasi di sekolah?



Sebagian besar responden (86.5%) menyatakan tidak ada mekanisme yang mengatur tentang keterbukaan informasi di sekolah

Partisipasi

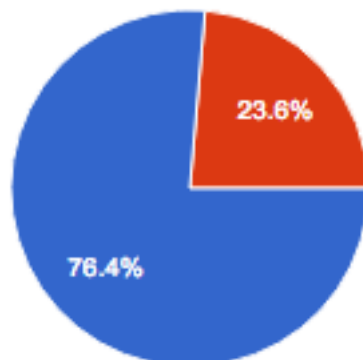
3.1. Adakah partisipasi publik dalam menyusun, mengawasi dan menjalankan kegiatan sekolah?



Setengah responden (50%) menyatakan ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan sekolah, dalam bentuk sebagai berikut:

- Pada saat pengambilan rapor dan menjelang ujian (pertemuan ortu)
- Melalui komite sekolah
- Melalui *Cek Sekolah-Ku* dan kotak saran
- CSO dan forum warga yang peduli pendidikan, seperti FPP di Semarang

3.2. Adakah lembaga atau komite atau organisasi masyarakat yang dibentuk untuk berpartisipasi dalam menyusun, mengawasi dan menjalankan kegiatan sekolah?



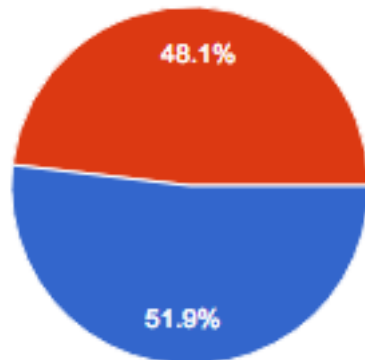
Sebagian besar responden (76.4%) menyatakan ada organisasi yang dibentuk sebagai bagian dari partisipasi masyarakat, antara lain:

- Komite sekolah
- FPP (forum peduli pendidikan)
- Dewan pembina dan pengawas sekolah

3.3. Bagaimana tanggapan/apresiasi pejabat publik dan/atau pemangku kepentingan melihat lembaga atau komite atau organisasi masyarakat?

Pemangku kepentingan mengapresiasi adanya keterlibatan masyarakat ini, meskipun belum optimal respon/tindak lanjutnya.

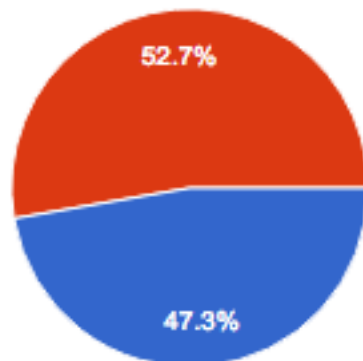
3.4. Adakah mekanisme partisipasi warga untuk memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengawasan sekolah?



Lebih dari setengah responden (51.9%) menyatakan ada mekanisme partisipasi warga, dalam bentuk sebagai berikut:

- Melalui *Cek Sekolah-Ku* dan kotak saran
- Komite sekolah (tetapi kurang efektif karena tidak partisipatif)

3.5. Apakah warga sekolah (orang tua, siswa, guru, organisasi independen) dilibatkan dalam penyusunan dan pengawasan kegiatan dan anggaran sekolah?



Hampir setengah responden (47.3%) yang menyatakan ada keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kegiatan dan anggaran, dalam bentuk sebagai berikut:

- Dalam pertemuan orang tua murid atau perwakilan komite sekolah dapat memberikan masukan terhadap anggaran sekolah
- Ada pula yang tidak terlibat langsung, tetapi diinformasikan hasil anggaran dan laporannya

3.6. Apa hambatan dan tantangan dari warga sekolah dalam melakukan partisipasi?

- Sosialisasi belum optimal
- Kekhawatiran untuk melapor, seperti takut ada ancaman dan intimidasi dari pihak sekolah
- Pihak sekolah yang belum sepenuhnya transparan dan responsif
- Kepedulian orang tua masih kurang, cenderung menyerahkan anak sepenuhnya ke pihak sekolah